

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Pentingnya pengembangan *civic education* (CE) di Indonesia didasari oleh lemahnya nilai-nilai *good citizen* pada masyarakat yang sedang mengalami transformasi --dari nilai-nilai otoritarianisme ke nilai-nilai demokrasi. Transisi masyarakat dari rezim otoriter menuju era demokratisasi, setidaknya, menyisakan persoalan-persoalan sosial baru. Dinamika sosial yang berubah cepat dan tidak diimbangi dengan pendidikan politik dan kewargaan dalam masyarakat akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan baru di tengah masyarakat. Kondisi ini diperparah lagi dengan melemahnya kontrol negara sebagai penegak hukum. Apabila diklasifikasikan secara umum, setidaknya ada beberapa persoalan sosial baru dalam transisi masyarakat Indonesia yang harus segera ditangani secara serius dan sistematis sebagaimana berikut:

1. Hancurnya Nilai-nilai Demokrasi dalam Masyarakat

Melemahnya kontrol negara sebagai penegak hukum dan keadilan masyarakat akhirnya semakin mengikis kepercayaan masyarakat pada upaya penegakan hukum di negeri ini. Beberapa kelompok sosial yang lemah di negeri ini hampir merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan kelompok sosial lain yang lebih kuat. Hilangnya keberpihakan negara pada nilai-nilai keadilan dan pudarnya ketaatan pada hukum menjadi sala satu persoalan serius yang mengancam keberlangsungan demokrasi di negeri ini. Di samping itu, rendahnya kesadaran representativeness di kalangan masyarakat dan anggota parlemen juga mengakibatkan kesadaran sistemik-demokratis akhirnya kurang bisa berjalan secara optimal. Kuatnya hegemoni partai politik atas anggota parlemen semakin mendistorsi makna anggota parlemen sebagai wakil rakyat.

Kepentingan politik partai seringkali mengalahkan kepentingan masyarakat yang diwakili anggota parlemen di badan legislatif. Demikian juga halnya dengan kesadaran representativeness di tengah masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menggugat wakil rakyat yang ada di parlemen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat juga masih rendah. Masyarakat juga seakan berjalan sendiri untuk memperjuangkan aspirasinya, sehingga seakan tidak ada koneksi antara wakil rakyat di parlemen dengan masyarakat yang diwakilinya.

2. Memudarnya Kehidupan Kewargaan dan Nilai-nilai Komunitas

Pelanggaran atas hak-hak individual, penjarahan atas hak milik orang lain, dan penjarahan tanah adat secara sistematis oleh pihak pengusaha atau pemerintah merupakan kasus yang semakin banyak dijumpai di negeri ini. Di samping itu, ada juga problem mental yang sangat serius mengancam kepentingan bersama masyarakat, yaitu tanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum. Kesadaran yang masih rendah sebagai anggota warga seringkali menimbulkan berbagai macam perilaku sosial yang mengancam fasilitas-fasilitas umum, seperti jalan raya, taman kota, telepon dan WC umum, serta berbagai fasilitas umum yang lain. Berbagai kasus kekecewaan sosial di negeri ini seringkali juga berujung pada perusakan fasilitas-fasilitas umum, seperti penebangan pohon di sepanjang jalan (di beberapa kawasan di Jawa Timur dan Jawa Tengah) akibat kekecewaan warga setempat terhadap proses politik di tingkat pusat, perusakan fasilitas lalu lintas di beberapa tempat akibat anarkhisme demonstrasi dan aksi massa, dan juga pembakaran kendaraan milik orang lain yang juga diakibatkan anarkhisme aksi massa. Kebersamaan sebagai anggota masyarakat semakin mengalami kemerosotan

3. Kemerosotan Nilai-nilai Toleransi dalam Masyarakat

Penyeragaman yang selama ini cenderung dilakukan rezim otoriter juga membawa akibat buruk pada harmonitas masyarakat yang plural, sehingga

nilai-nilai lokal-tradisional termarginalisasi secara sistematis (sementara pada saat yang sama belum ditemukan nilai-nilai baru yang bisa mentransformasikan masyarakat yang bersatu dalam keberagaman). Pada saat kontrol negara mulai melemah, maka keberagaman sosial yang dahulu dimarginalisasikan akhirnya semakin menguat secara chauvinistic, sehingga mengancam harmoni dalam pluralitas masyarakat di negeri ini. Intoleransi juga semakin menggejala dalam konteks interaksi antar-agama, antar-daerah, antar-etnis, antar-partai politik, dan lain-lain. Berbagai kasus pertikaian etnis (seperti Madura-Dayak di Kalimantan), pertikaian agama (seperti Islam-Kristen di Maluku), pertikaian pendukung partai politik (seperti PDIP-PKB), dan berbagai macam pertikaian di negeri ini merupakan cermin bagi kemerosotan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat. Kecenderungan untuk memaksakan kehendak suatu kelompok sosial tertentu juga semakin sering terjadi dalam transisi masyarakat menuju demokratisasi di negeri ini. Sweeping-atas buku-buku berbau kiri, penculikan dan penganiayaan terhadap aktivis gerakan tertentu, dan juga perusakan berbagai fasilitas peribadatan dan pendidikan di Jawa Timur dan Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu semakin memperpanjang daftar hitam kemuraman wajah bangsa ini yang 'bhinneka tunggal ika'.

4. Memudarnya Nilai-nilai Kejujuran, Kesopanan, dan Rasa Tolong-menolong

Nilai-nilai kejujuran, kesopanan, sikap tenggang rasa, saling tolong-menolong, dan ketundukan pada hukum seakan semakin menipis. Ikatan-ikatan sosial lama yang mengedepankan sikap kasih sayang terhadap sesama seakan berganti wajah dan mengalami proses dehumanisasi. Anggota masyarakat seakan menjadi individu-individu yang kaku dan social-disembedded. Maraknya tindakan asusila juga semakin dirasakan dalam transisi masyarakat saat ini. Perjudian, peredaran narkoba, perkelahian

pelajar, dan sebagainya seakan menjadi fenomena keseharian yang muncul di media massa yang pada akhirnya berakibat buruk pada upaya pendidikan generasi muda.

5. Melemahnya Nilai-nilai dalam Keluarga

Melemahnya nilai-nilai dalam keluarga merupakan akibat saling pengaruh antara faktor eksternal dan faktor internal keluarga, dan hal ini ditandai dengan melemahnya nilai tanggungjawab dalam keluarga, tidak terpenuhinya kebutuhan akan dukungan dan perlindungan terhadap anggota keluarga, serta lunturnya moral dan kebersamaan dalam keluarga. Kekerasan terhadap anak dan eksploitasi anak untuk bekerja mencukupi kebutuhan hidup keluarga (terutama terjadi di kalangan keluarga miskin dengan melupakan hak pendidikan anak) merupakan fenomena yang cukup menggejala di perkampungan-perkampungan kumuh di perkotaan-perkotaan Indonesia akibat krisis ekonomi berkepanjangan di negeri ini. Di samping itu, upaya pendidikan melalui keluarga juga semakin memprihatinkan akibat krisis ekonomi yang menyebabkan orang tua (baik ayah maupun ibu) harus bekerja lebih keras lagi dan menghabiskan waktu untuk pekerjaan dan uang guna mencukupi kebutuhan keluarga.

6. Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi yang paling buruk di muka bumi. Mewabahnya berbagai bentuk *abuse of power* tersebut juga ditandai dengan tidak diperolehnya pelayanan yang adil dari penyelenggaraan negara. Transparansi dalam pemakaian keuangan negara seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Kesadaran kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga belum terlalu tinggi, bahkan seringkali juga menghadapi represi dari rezim yang sedang berkuasa. Akses

masyarakat terhadap informasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan juga banyak terhambat, yang pada akhirnya memberikan peluang praktek KKN. Penegakan hukum terhadap penjahar uang negara dan rakyat juga seringkali terabaikan dan cenderung tunduk pada kepentingan politik tertentu. Kenaikan tarif listrik, telepon, bahan bakar mesin, pelayanan air minum tanpa disertai pelayanan publik yang memuaskan merupakan fenomena ketidakadilan sosial atas masyarakat banyak. Pelayanan publik, seperti pelayanan KTP, SIM, STNK, ibadah haji, dan sebagainya, juga seringkali masih bersifat kolusif dan tidak transparan penggunaannya.

7. Kerusakan Sistem dan Kehidupan Ekonomi

Kerusakan sistem ekonomi ditandai dengan merebaknya monopoli yang bersembunyi dengan istilah tata niaga, hilangnya kompetisi yang sehat dalam dunia usaha, dan ketertutupan dari tuntutan pasar bebas. Kebijakan makro dan mikro ekonomi bangsa ini yang tidak mengacu pada persaingan yang sehat dan fair, keadilan serta pemerataan kesejahteraan bagi rakyat telah menimbulkan polarisasi sosial dan ketimpangan ekonomi yang besar. Membesarnya tingkat pengangguran terdidik dan kurang terdidik dan pemusatan kawasan pembangunan merupakan persoalan ekonomi bangsa ini yang belum selesai. Di samping persoalan struktural tersebut, persoalan kultural dan mental di kalangan masyarakat juga cukup besar menghambat kemajuan kehidupan ekonomi. Rendahnya indeks kewirausahaan (*entrepreneurship*) di kalangan masyarakat juga merupakan kendala pembangunan ekonomi, terutama bagi kalangan pribumi. Pola hidup konsumtif juga cukup menggejala di kalangan masyarakat.

8. Pelanggaran terhadap Nilai-nilai Kebangsaan

Fenomena gerakan separatisme di Indonesia akhir-akhir ini cukup menggejala, seperti Aceh, Papua, dan Maluku. Banyak faktor yang menyebabkan disintegrasi bangsa ini, baik faktor ekonomi, politik, keamanan,

maupun budaya. Keberagaman dalam satu bangsa (*Bhineka Tunggal Ika* atau *unity in diversity*) seakan mulai terkikis. Solidaritas kebangsaan seakan tersumbat oleh berbagai keterbatasan dan kentalnya kepentingan untuk memisahkan diri. Hampir satu juta orang saat ini hidup di wilayah-wilayah pengungsian, baik di Nusa Tenggara Timur, Aceh, Kalimantan, Maluku, Jawa Timur, dan beberapa belahan wilayah yang lain. Oleh karenanya, perlu ada upaya untuk reorientasi *nation building* untuk kembali merekatkan ikatan-ikatan kebangsaan yang beragam menjadi satu bangsa.

Beberapa komponen masyarakat yang menganggap reformasi sebagai peluang emas, maka reformasi adalah sebuah pintu terbuka bagi sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai baru menuju apa yang disebut dengan warga negara yang baik (*good citizen*). Reformasi menuju *good citizen* bagi Indonesia bukanlah hal yang mudah, karena luasnya wilayah, beragamnya suku-bangsa, tingkat pendidikan yang beragam, kesejahteraan ekonomi yang senjang, serta jumlah penduduk yang sangat besar. Banyak media yang bisa digunakan untuk menyebarkan ide *good citizen*, baik media cetak, elektronik, seminar, lokakarya, dan tentu saja lewat pendidikan. Efektivitas berbagai media di atas tentu akan sangat tergantung pada kemampuannya, terutama sejauh mana media tersebut mampu memasuki pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Secara teoritis dan praktis, lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam usaha merubah masyarakat menuju *good citizen*. Hal ini disebabkan prosesnya yang sistematis, kurikulum yang terencana, tahapan proses yang jelas, serta pendidik yang terlatih. Istilah pembentukan *good citizen* melalui pendidikan inilah yang kemudian dikenal sebagai *civic education*.

Pada perguruan tinggi di Indonesia, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS), sudah ada usaha yang mirip dengan gagasan *civic education* akan tetapi isinya masih jauh dari

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penilaian evaluatif berbagai komponen *stakeholders* Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) terhadap Pendidikan Kewiraan dan PKN ?
2. Bagaimana *stakeholders* melihat peluang pengembangan *civic education* di PTM ?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pengembangan *civic education* di PTM ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang mengambil dua tema yang terkait dengan *civic education* dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor-faktor keterbatasan program Pendidikan Kewiraan dan PKN yang pernah dilakukan pada perguruan tinggi.
2. Mendeskripsikan bagaimana penerimaan, kesiapan, peluang dan kebutuhan *stakeholders* Perguruan Tinggi Muhammadiyah terhadap pengembangan *civic education*.
3. Menganalisis hasil dua penelitian di atas untuk menyusun draft desain pengembangan *civic education* di perguruan tinggi